

## IMPLEMENTASI PROGRAM JAKPRENUER DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA)

Iyas Nur Hakim<sup>1</sup>, Dody R Setiawan<sup>2\*</sup>, Mohammad Sofyan<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [inh.iyas97@gmail.com](mailto:inh.iyas97@gmail.com)<sup>1</sup>, [dodi.rs2303@gmail.com](mailto:dodi.rs2303@gmail.com)<sup>2</sup>, [sofyan@stiami.ac.id](mailto:sofyan@stiami.ac.id)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

implementation, Jakprenuer, UMKM

*DKI Jakarta as one of the axis of national economic growth is certainly in the spotlight in economic development, one of which is in the growth sector of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The provincial government of DKI Jakarta is committed to developing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the midst of the people of the capital. Integrated Entrepreneurship Program was initiated more than two years ago, and continues to be developed according to the dynamics of the MSME industry and market needs, where it listens to the aspirations of entrepreneurs. Present with the new brand called Jakprenuer, this program is expected to be a platform for creation, facility and collaboration for the development of MSMEs through the entrepreneurship ecosystem, such as start-ups, educational institutions and financing institutions. This study aims to determine the implementation of the Jakprenuer program as an effort to improve the economy of MSMEs in Tanjung Priok District during the Covid-19 pandemic, as well as identify obstacles that arise and the efforts made to overcome them. This descriptive research used a qualitative method based on the implementation theory of Edward III. Data were obtained through direct interviews with informants. The results of the study show that the implementation of the Jakprenuer program has been going well, although there are still some obstacles that must be overcome.*

### PENDAHULUAN

Fenomena pandemi Covid – 19 yang saat ini melanda merupakan wabah yang terjadi secara tidak terkendali pada hampir di semua negara di dunia. Pandemi tersebut tidak hanya menjadikan krisis kesehatan di dunia tapi berdampak pada berbagai sektor, diantaranya sektor ekonomi. Di Indonesia sendiri hampir 89 % pelaku ekonomi adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) bisa dikatakan sebagai roda penggerak perekonomian di Indonesia. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) berkontribusi besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Lesunya omzet UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia saat ini sangat berpengaruh pada merosotnya perekonomian di Indonesia. Pemerintah telah berupaya dalam berbagai hal untuk membantu masyarakat para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil

Menengah) dalam keberlangsungan hidup pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Namun, kunci keberlangsungan hidup pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) nyatanya, yaitu pada kelancaran usaha. Di Jakarta sendiri dalam catatan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, banyak pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) mengalami penurunan omzet usaha hingga 50 % bahkan ada yang tidak dapat melanjutkan usahanya akibat pandemi Covid – 19. Hal ini tentu menjadi sebuah keresahan bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Jakarta.

Bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang baru merintis usahanya ditengah pandemi Covid – 19 karena PHK akibat dampak pandemi Covid – 19 ini merasa tidak tahu bagaimana cara mengembangkan usahanya, mempromosikan produknya dengan menarik sehingga tidak mendapatkan perhatian dari calon konsumen. Tidak sedikit juga pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menginginkan bantuan permodalan untuk usahanya serta pembangunan relasi agar memudahkan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menemukan pasar yang cocok berdasarkan produknya.

Keresahan ini tentu disikapi oleh Pemprov DKI Jakarta dengan serius dengan menciptakan sebuah solusi dari permasalahan tersebut salah satunya dengan menghadirkan Program Jakpreneur. Jakpreneur merupakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemprov DKI Jakarta dengan landasan hukum Pergub Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan penyempurnaan standarisasi kerja dalam Program OKE OCE yang dimulai 2018 dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) pada 2019. Pemprov DKI Jakarta menghadirkan Jakpreneur sebagai platform kreasi, fasilitas dan kolaborasi pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) melalui ekosistem kewirausahaan seperti Start-up, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan.

Dalam pelaksanaan Program Jakpreneur ini, program ini diampuh oleh 6 SKPD, yang terdiri dari : 1) Dinas Perindustrian Perekonomian Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), 2) Dinas Sosial, 3) Dinas Tenaga Kerja, 4) Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, 5) Dinas Ketahanan Pangan Kelautan & Perikanan, dan 6) Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan. Masing masing SKPD ini memiliki peran dalam pelaksanaan Program Jakpreneur ini seperti, pada Dinas Tenaga Kerja yang menjurus kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan akan diberdayakan untuk memulai usaha, kemudian pada Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan yang menjurus bagaimana pemberdayaan komunitas perempuan seperti komunika PKK, agar memulai sebuah usaha, dan pada Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan menjurus bagaimana kelompok / individu yang berkecimpung dalam sumber daya perikanan dapat membuka usahanya seperti olahan hasil laut / perikanan dan sejenisnya.

Pada Dinas Perindustrian Perekonomian Usaha Kecil dan Menengan (PPKUKM) yang menjadi leading sektoralnya. Di Jakpreneur, Pemprov DKI Jakarta membuka banyak akses bagi para pesertanya untuk lebih mudah mengembangkan usahanya. Beberapa fasilitas pada Program Jakpreneur yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta meliputi :1) Pelatihan, pelaku usaha akan diberikan fasilitas pelatihan dari yang tingkat dasar sampai pelatihan tingkat lanjutan, 2) pendampingan usaha, pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping program Jakpreneur dalam melakukan : pemasaran, pemodalan, laporan keuangan, menciptakan ide ide kreatif dan melakukan perubahan pola pikir kewirusahaan sampai membentuk pelaku usaha yang unggul, 3) perizinan, pelaku usaha akan difasilitasi dokumen perizinan dan atau nonperizinannya, dapat dilakukan perorangan atau kolektif oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Jakpreneur yang berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Provinsi DKI Jakarta, 4) Pemasaran, fasilitas pemasaran produk pelaku usaha Jakpreneur dapat dilakukan melalui penjualan langsung atau penjualan melalui sistem perdagangan berbasis elektronik dan atau dalam jaringan (online), 5) Pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi, aplikasi pelaporan keuangan ini bermanfaat untuk membantu pembuatan laporan keuangan usaha yang dikelola, selain itu juga memudahkan pemenuhan persyaratan akses pemodal, 6) Pemodal, pelaku usaha Jakpreneur yang telah memiliki izin usaha ataupun belum memiliki akan difasilitasi untuk mendapatkan akses pemodal dari perbankan dan atau lembaga dan atau pihak lainnya. Di kecamatan Tanjung Priok sendiri sudah dapat dilihat progres dari pelaksanaan program Jakpreneur ini dari awal pelaksanaannya di tahun 2018 sebelum pandemi Covid 19 terjadi hingga bulan Juli 2021 ketika pandemi Covid 19 ini tengah terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memutuskan melakukan penelitian mengenai **Implementasi Program Jakpreneur Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian UMKM di Masa Pandemi Covid – 19 (Studi kasus di Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara).**

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut S.P Siagian (2004:2) memberikan definisi administrasi sebagai berikut : Administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tentunya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan administrasi menurut A. Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991, h.9) administrasi diartikan : Sebagai arahan, pemerintah, kegiatan implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip – prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempersentasikan keputusan, pertimbangan – pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Chandle dan plano dalam Keban dalam Harbani Pasolong (2008:9), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan – keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditunjukkan untuk mengatur “publik affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan – perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusai dan keuangan.
3. **Kebijakan Publik** : Menurut Friedrich (Hamdi 2014:36) : Kebijakan adalah suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai tujuan atau mewujudkan suatu maksud.
4. **Pelayanan Publik** : Menurut Sinambela (2005:5) dalam Harbani Pasolong (2010:128): pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat produk pada suatu secara fisik. Menurut Agung Kurniawan 2005:6 dalam Harbani (2010:128):

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

5. **Implementasi Kebijakan Publik** : Menurut Ripley dan Franklin (Winarno 2014 : 148): Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang – undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan – tindakan oleh sebagai aktor khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Menurut Mazmania dan Sabatler dalam buku Wahab (2008 : 65) : Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian – kejadian dan kegiatan – kegiatan yang timbul sesudah disahkannya kebijakan publik yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak tertentu pada masyarakat ataupun kejadian – kejadian.
6. **UMKM** Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah : (1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini. (2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan usaha cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini. (3) Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas. (4) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur oleh undang – undang ini
7. **Kewirausahaan** : Tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.961/KEP/M/XI/1995 dicantumkan bahwa : (1) Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan. (2) Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan lebih besar. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam usaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Selain itu kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif mencari peluang menuju sukses. Sedangkan menurut Peggy A. Lambing (1999), kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak.

## **Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Implementasi Program Jakprenuer Terhadap UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian UMKM di Masa Pandemi Covid 19 (Studi kasus di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah DKI Jakarta). Program Jakprenuer merupakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemprov DKI Jakarta dengan landasan hukum Pergub Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan penyempurnaan standarisasi kerja dalam program OKE OCE yang dimulai pada 2018 dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) pada 2019. Pemprov DKI Jakarta menghadirkan Jakprenuer sebagai platform kreasi, fasilitas dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti Start-up, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Definisi metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012: 9) adalah: “Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi”. Pendekatan kualitatif digunakan karena adanya pertimbangan dalam hal pencapaian konsep penelitian mengenai kebijakan program Jakprenuer sebagai bentuk UMKM dalam upaya meningkatkan perekonomian UMKM di masa pandemi Covid 19 sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan agar tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Komunikasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI melalui SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta dalam hal ini di tingkat Kecamatan, yaitu di Kecamatan Tanjung Priok mengenai Program Jakprenuer ini terdiri dari komunikasi eksternal. Yang penyampaiannya secara langsung melalui penyelenggara sosialisasi dan bimbingan teknis. Berikut ini adalah wawancara dengan Dedy Indra Bayu Staf Jakprenuer Kecamatan Tanjung Priok. “Kita selama ini, selama pandemi ini kita sosialisasinya lewat zoom meeting, salah satunya lewat Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan lalu di sosialisasikan melalui masyarakat. Kita sudah ada 3 kali pelatihan, kita kan punya grup WA jadi yang kita daftarin itu kita masukin ke grup WA, segala sesuatu yang berkaitan dengan Jakprenuer itu kita

share di WA grup. Sebelum pandemi kita setiap awal bulan itu kita keliling kelurahan, jadi sosialisasi program program yang kita berikan semua kita jelaskan disitu masyarakatnya nanti direkrutmen dari kelurahannya masing masing, biasanya kerja samanya dengan pak lurah, RT,RW mengirim pedagang pedagang untuk sosialisasi”. (wawancara, 22 Juli 2021). Berikut progress pengembangan usaha peserta binaan Program Jakpreneur Kecamatan Tanjung Priok tahun 2021.

**Tabel IV. 1 Perkembangan Program Jakprnuer 2021 Kec. Tj. Priok**

Kecamatan Tj. Priok 2021	Realisasi	Target	Persentase
Pendaftaran	1870	2149	87%
Pelatihan	1582	2240	71%
Pemasaran	115	101	114%
Pelaporan Keuangan	230	53	433%
Pendampingan	914	2046	45%
Perizinan	964	318	303%
Pemodalan	130	53	245%

Sumber : Jakpreneur Kecamatan Tanjung Priok

Dari pernyataan para informan, melalui hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa komunikasi eksternal telah dilakukan dengan cukup baik oleh Pemprov DKI melalui SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta dalam hal ini di tingkat Kecamatan, yaitu di Kecamatan Tanjung Priok. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat kendala karena sebuah fenomena yang tidak bisa dihindarkan yaitu Pandemi Covid 19 yang membuat proses sosialisasinya kurang maksimal.

## 2. Sumber Daya

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sumber daya menjadi salah satu aspek yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan sebuah program / kebijakan. Oleh karena itu, untuk mendukung implementasi suatu program / kebijakan, perlu didukung oleh tersedianya beberapa sumber daya yang memadai antara lain :

### 1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan salah satu aspek penting agar sebuah pelaksanaan program / kebijakan berjalan dengan baik. Maka dari itu tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan, keahlian serta kesiapan untuk melaksanakannya adalah hal penting.

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Dedy Indra Bayu, Staf Jakprenuer Kecamatan Tanjung Priok diperoleh informasi sebagai berikut. “Kita pendamping di kecamatan Tanjung Priok itu ada 8 orang, pendidikan minimal S1 terus kita punya sertifikat sebagai pendamping dari BNSP, terus ada pelatihan pelatihan khusus untuk pendamping. Kita engga mungkin terjun ke masyarakat tanpa dibekali ilmu. Walaupun kita kena Covid kita tetap berjalan”. (wawancara, 22 Juli 2022). Selanjutnya dari hasil penelitian melalui wawancara dengan Staf Jakprenuer Kecamatan Tanjung Priok lainnya, Ulfa Farah Azahra diperoleh informasi sebagai berikut. “Terkait sumber daya manusia di sini, kita ada 8 pendamping jakprenuer, kemarin 2 orang dari pendamping ada yang harus isolasi mandiri karena terjangkit Covid 19 yang membutuhkan waktu recovery selama 2 minggu, pasti di tim kita agak jomplang berkurang ya, tapi kita tetap jalan dengan orang yang ada, kita saling back up Alhamdulillah berjalan normal, karena kita juga sudah melalui tahapan tahapan pelatihan sebagai pendamping sebagai kompetensi kita untuk program ini”. (wawancara, 27 Juli 2021)

## 2) Sumber daya pendukung

Selain pendamping pelaksana, tersedianya sumber daya pendukung merupakan hal yang sangat penting dan ikut menentukan kelancaran implementasi kebijakan. Suatu kebijakan tidak akan berjalan lancar tanpa didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, teknologi dan informasi yang memadai. Hal ini dikarenakan dalam implementasi kebijakan, sumber daya pendukung merupakan input yang didayagunakan untuk melaksanakan kebijakn yang ditetapkan.

Berkenaan dengan implementasi Program Jakprenuer di Kecamatan Tanjung Priok, terkait dengan sarana dan prasaran, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara Staf Jakprenuer Kecamatan Tanjung Priok, Dedy Indra Bayu diperoleh infomasi prasarananya sebagai berikut : “sarana dan prasana ini kita didukung oleh Pemda DKI kita dikasih laptop, mesin foto copy dan peralatan ATK dan kita digaji. Kita juga mengadakan bazar sebelum pandemi kta laksanakan bazar offline tetapi selama pandemi terjadi kita laksanakan bazar online bekerja sama dengan marketplace seperti tokopedia”. (wawancara 22 Juli 2021)

## 3. Disposisi

Disposisi adalah salah satu perilaku yang ditunjukkan oleh elemen – elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subjek dan objek kebijakan. Termasuk didalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan tindak lanjut dari suatu kegiatan pembangunan.

Dukungan dan komitmen pelaksana akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi suatu program / kebijakan. Sikap para informan dalam implementasi kebijakan ini tergambar jelas dari wawancara yang dilakukan bahwa kebijakan Program Jakprenuer ini sangat didukung oleh pegawai di lingkungan Kecamatan Tanjung Priok.

Untuk menggambarkan disposisi pejabat dan pegawai dalam Implementasi Prgoram Jakpreneuer ini, sub aspek pertanyaan dari disposisi yang penulis ajukan kepada para informan yaitu sikap pelaksana terhadap Program Jakpreneur.

Disini penulis ingin mengetahui bagaimana sikap pelaksana terhadap Implementasi Program Jakprenuer ini, berikut hasil wawancara dengan para informan berkaitan dengan sub aspek sikap pelaksana tersebut.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur organisasi. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat dalam bentuk standar operation procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah organisasi, struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Berikut wawancara dengan Staf Jakprenuer Kecamatan Tanjung Priok Dedy Indra Bayu. “Jakprenuer ini kita diampuh 6 SKPD, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) sebagai leading sektoral berikutnya Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan. SKPD ini bertanggung jawab ke Gubernur, kalau di PPUKM setiap kecamatan itu ada 8 pendamping kalau dinas lain ada yang 1 ada yang 2. Sektor kami beda beda missal PAP itu seperti PKK, missal di PKK itu ada yang punya usaha terus untuk KPKP yang berkaitan dengan hewan. Selama ini kita berjalan dengan baik saling bersinergi”. (wawancara 22 Juli 2021)

### Pembahasan

#### 1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran – ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu – individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan program dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana sampai ke pengguna. Hal ini juga selaras dengan pendapat Cook & Hunsaker (2007) yang menyatakan bahwa, komunikasi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi, dan pemuas kebutuhan sosial. Dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien .

Maka perlu adanya konsistensi dalam hal komunikasi sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan dari program ini. Hal ini didukung oleh pendapat Agustino (2006) yang menyatakan bahwa, komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Disamping itu, perlu juga membangun budaya masyarakat melalui berbagai hal, melihat tingkat kesiapan pelaksana (Pendamping UMKM) dan pengguna (UMKM Binaan) dalam mengimplementasikan Program Jakprenuer ini sudah cukup bisa dikatakan baik. Dalam komunikasi ini, penulis menyimpulkan bahwa komunikasi eksternal



telah dilakukan dengan cukup baik oleh Pemprov DKI melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) khususnya SKPD PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok, terlihat dalam progress kinerjanya yang menunjukkan sudah cukup baik, terlihat walaupun dalam pendaftaran belum mencapai target yaitu 2149 di tahun 2021 yang hanya berjumlah 1870 pendaftar atau dalam persentase yaitu 87% .Begitu juga dengan persentase pelatihan 71%, khusus untuk pendampingan masih belum cukup dikatakan karena hanya mencapai 45% akan tetapi progress positif terus dilakukan oleh Jakprenuer Kecamatan Tanjung Priok di tengah keterbatasan karena pandemi Covid 19 ini, terlihat pada persentase pemasaran 114%, peloporan keuangan 433%, perizinan 303% dan pemodalannya 245% yang melampaui target.

## 2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia. Tersedianya sumber daya yang mempunyai kemampuan, keahlian serta kesiapan untuk melaksanakan sebuah program / kebijakan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sebuah program / kebijakan. Menurut Edward III dalam Agustino (2006), sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Dengan mencermati hasil wawancara sebelumnya, menurut pendapat peneliti kesiapan dari aparatur pelaksana program khususnya di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) khususnya SKPD PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok dalam Implementasi Program Jakprenuer sudah cukup baik terlihat walaupun dalam kondisi pandemi yang tidak bisa dihindari dan bahkan dari pihak pendamping terkena covid 19 pun, pendamping tetap profesional dalam menjalankan tugas sebagai bentuk tanggung jawab juga.

Selain aparatur pelaksana, tersedianya sumber daya pendukung merupakan hal yang sangat penting dan ikut menentukan kelancaran implementasi kebijakan. Suatu kebijakan tidak akan berjalan lancar tanpa didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut peneliti sarana dan prasarana yang diberikan oleh pendamping Program Jakprenuer Kecamatan Tanjung Priok sudah cukup memadai dan baik. Peserta binaan merasakan manfaat yang diberikan dari Implementasi Program Jakprenuer walaupun dengan segala keterbatasan dikarenakan pandemi covid 19 yang terjadi.

## 3. Disposisi

Disposisi adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh elemen– elemen dari suatu kegiatan implementasi program / kebijakan untuk mampu menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang program / kebijakan pemerintah pada subjek dan objek program / kebijakan. Termasuk didalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan tingkat lanjut dari suatu kegiatan pembangunan. Edward III dalam Winarmo (2005), mengemukakan kecenderungan – kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

Untuk menggambarkan disposisi aparatur / pelaksana (pendamping) program dalam Implementasi Program Jakprenuer di Kecamatan Tanjung Priok, sub aspek dari pertanyaan dari penulis diajukan kepada para informan yaitu sikap pelaksana terhadap Implementasi Program Jakprenuer Dalam hal ini, yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam Implementasi

Program Jakpreneur, sikap dan komitmen dari pendamping Program Jakpreneur Kecamatan Tanjung Priok sangatlah optimal dan profesional dari penjelasan informan peserta binaan Program Jakpreneur Kecamatan Tanjung Priok menjelaskan, pendamping sangat profesional dalam menjalankan tugasnya memberikan pendampingan serta arahan kepada peserta binaan Program Jakpreneur Kecamatan Tanjung Priok.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakn. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur organisasi. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat dalam bentuk standar operation procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah organisasi, struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Hal ini selaras dengan pendapat Edward III dalam Winarmo (2005), yang mejelaskan dua karakteristik utama dari birokrasi yakni Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi, Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta penyeragaman dalam organisasi yang kompleks dan luas, sedangkan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

#### 5. Hambatan dan Upaya

Dalam penelitian ini terdapat hambatan – hambatan dalam Implementasi Program Jakpreneur, dari wawancara yang dilakukan ada 3 point yang ada, yaitu kondisi pandemi yang terjadi dan tidak bisa dihindari yang mempengaruhi optimalisasi implementasi program ini , kemauan atau minat dari masyarakat masih kurang antusias mengikuti program ini dan keterbatasan peserta dalam menguasai teknologi informasi khususnya bagi UMKM yang sudah lanjut usia. Maka dalam bab ini akan dijelaskan upaya – upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut :

- 1) Sosialisasi ataupun penyampain informasi dan materi pelatihan kita lakukan secara online melalui wa group dan zoom meeting. Keterbatasan yang terjadi karena pandemi Covid 19 memang tidak bisa dihindari akan tetapi keterbatasan ini memunculkan cara yang berbeda dan kebiasaan baru untuk beradaptasi dalam menghadapinya.
- 2) Kemauan dan minat masyarakat untuk bergabung dalam program ini. Melakukan sosialisasi dengan menarik, menjelaskan tentang sistem dari program ini serta hal apa yang dapat diterima oleh peserta binaan jika ikut bergabung dalam program ini.
- 3) Keterbatasan peserta dalam menguasai teknologi informasi khususnya bagi peserta UMKM yang sudah lanjut usia. Terus mengarahkan dan membimbing dalam proses pelaksanaan program ini sebagai bentuk dari tanggung jawab dari pelaksana program yaitu pendamping kepada peserta binaan UMKM.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Program Jakpreneur dalam upaya meningkatkan perekonomian UMKM di masa Pandemi Covid 19 di Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil pengamatan di lapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa Implementasi rogam Jakpreneur dalam upaya meningkatkan perekonomian UMKM di masa Pandemi Covid 19 di Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara sudah berjalan dengan baik. Adapun indikator yang menyebabkan Implementasi Program Jakpreneur dalam upaya meningkatkan perekonomian UMKM di masa Pandemi Covid 19 di Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara dapat dikatakan baik adalah :
  - 1) Komunikasi , telah dilakukan dengan cukup baik oleh pelaksana program yaitu pendamping Program Jakprenuer di Kecamatan Tanjung Priok, terlihat pada progress kinerjanya per Juli2021 hingga target 2021 menunjukkan persentase peserta yang mendaftar sejumlah 87% lalu yang mengikuti beberapa fasilitas yang disediakan oleh Program Jakprenuer antara lain pelatihan 71%, pemasaran 114%, pelaporan keuangan 433%, pendampingan 45%, perizinan 303%, pemodalan 245%.
  - 2) Sumber Daya, kemampuan serta kesiapan dari aparatur pelaksana program khususnya pad SKPD Perindustrian Perekonomian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) dalam Implementasi Program Jakprenuer sudah baik. Dillihat dari penyediaan sarana dan prasaran dalam fasalitas pelatihan serta respon dari peserta binaan yang mejelaskan bahwa pendamping sudah optimal dan profesional.
  - 3) Disposisi, dalam melaksanakan Implementasi Program Jakprenuer ini sikap pelaksana atau respon terhadap kebijakan sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
  - 4) Struktur Birokrasi, sudah cukup dalam dalam melaksanakan implementasi dari kebijakan.
2. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam Implmentasi Program Jakprenuer, dari hasil penelitian yang dilakukan ad 3 poin hambatan yang ada yaitu kondisi pandemi yang terjadi dan tidak bisa dihindari yang mempengaruhi optimalisasi implementasi program ini , kemauan atau minat dari masyarakat masih kurang antusias mengikuti program ini dan keterbatasan peserta dalam menguasai teknologi informasi khususnya bagi UMKM yang sudah lanjut usia.
3. Upaya – upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut sebagai berikut :
  - 1) Sosialisasi ataupun penyampain informasi dan materi pelatihan kita lakukan secara online melalui wa group dan zoom meeting. Keterbatasan yang terjadi karena pandemi Covid 19 memang tidak bisa dihindari akan tetapi keterbatasan ini memunculkan cara yang berbeda dan kebiasaan baru untuk beradaptasi dalam menghadapinya.
  - 2) Kemauan dan minat masyarakat untuk bergabung dalam program ini. Melakukan sosialisasi dengan menarik, menjelaskan tentang sistem dari program ini serta hal apa yang dapat diterima oleh peserta binaan jika ikut bergabung dalam program ini.
  - 3) Keterbatasan peserta dalam menguasai teknologi informasi khususnya bagi peserta UMKM yang sudah lanjut usia.Terus mengarahkan dan membimbing dalam proses pelaksanaan program ini sebagai bentuk dari tanggung jawab dari pelaksana program yaitu pendamping kepada peserta binaan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Amalia, alfi dkk. (2012). Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang Di Kota Semarang. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. h.8.

Edi Suharto. (2017). Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, Bandung: PT Refika Aditama

Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media

Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: CV PUSTAKA SETIA

Kumiullah, Zukhruf , Ardhariksa. (2021). Kewirasusahaan dan Bisnis. Yayasan kita Menulis.

Mulyadi Mohammad. (2020). Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta : Publica Institute

Octavina Aliefty Mutiara, Suryadi dan Stefanus Pani Rengu. (2013). Kepemimpinan Bupati Dalam Meningkatkan Pembangunan (Studi tentang Kepemimpinan Bupati di Kabupaten Bangkalan 2003 – 2013). Jurnal Administrasi Publik. Vol 1. No. 5, 2013 h. 910-917.

Panji Anoraga. (2010). Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro. Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana. h.32

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti.(2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media

Rahman Mariati. (2017). Ilmu Administrasi . Makassar : CV Sah Media Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: ALFABETA

Suharto, Edi. (2013). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: ALFABETA

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab 1, Pasal 1

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2013, hlm. 3